



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
- b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan dokumen yang disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

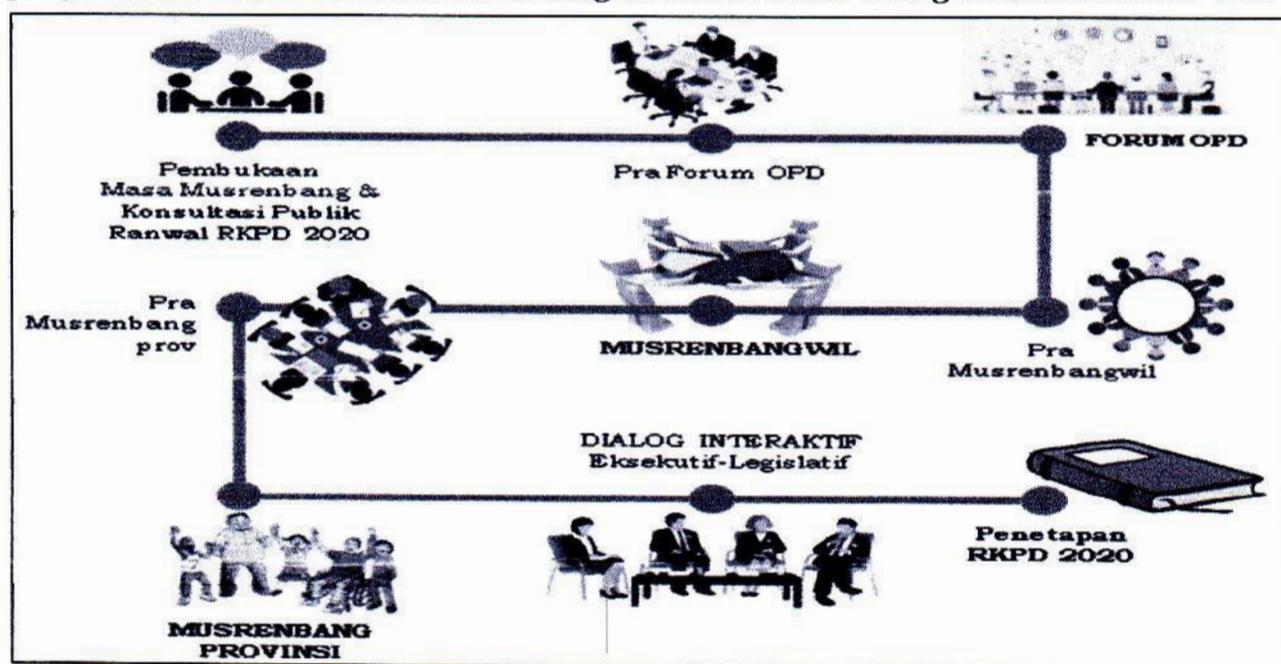
RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam pentahapan pembangunan Jawa Tengah jangka menengah (5 tahunan) yaitu tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2020 merupakan tahap ke-2 dengan fokus pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Tahap ke-II menjadi tahapan penting untuk memantapkan langkah Jawa Tengah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2018 serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan di Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan arah kebijakan dan fokus pembangunan tahap ke-2.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha,

akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Hal tersebut didukung dengan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Proses penyusunan dokumen RKPD Jawa Tengah Tahun 2020 meliputi : (1) Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2019; (2) Pra Forum Perangkat Daerah (PD); (3) Forum PD; (4) Pra Musrenbang Wilayah; (5) Musrenbang Wilayah; (6) Pra Musrenbang Provinsi; (7) Musrenbang Provinsi; (8) Dialog Interaktif Eksekutif-Legislatif; dan (9) Penetapan RKPD.

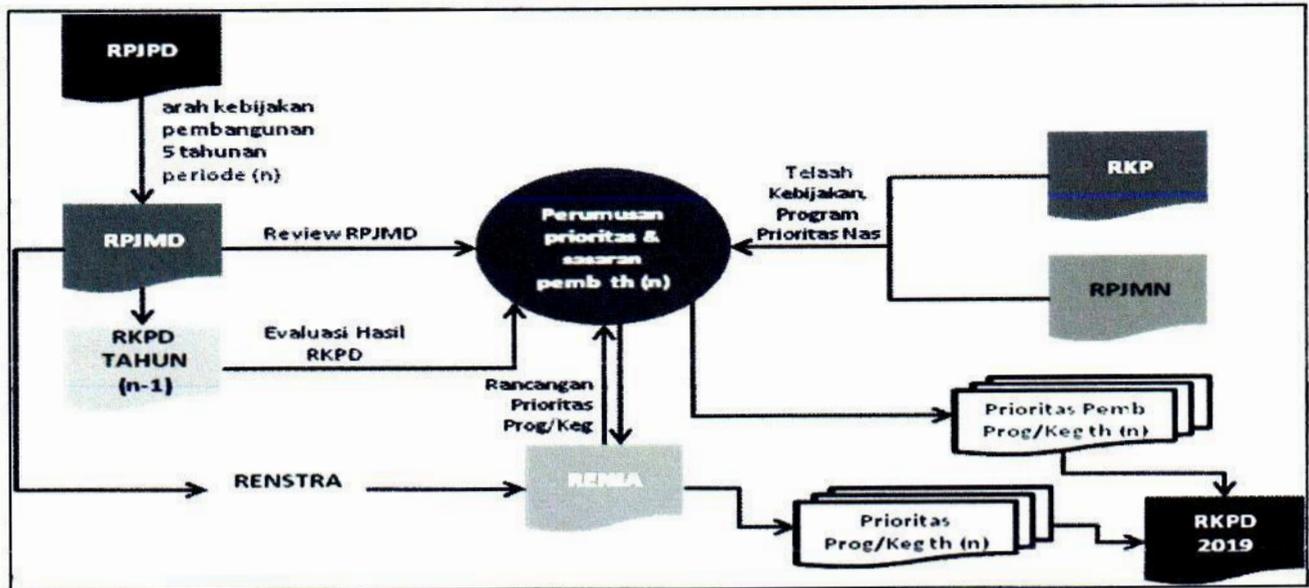


Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RKPD Jawa Tengah Tahun 2020

Guna memperoleh keselarasan dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020, dilakukan serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Di antaranya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 serta telaah kebijakan nasional dan program prioritas nasional yang termuat di dalam RKP maupun Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.2.

12



Gambar 1.2.
Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

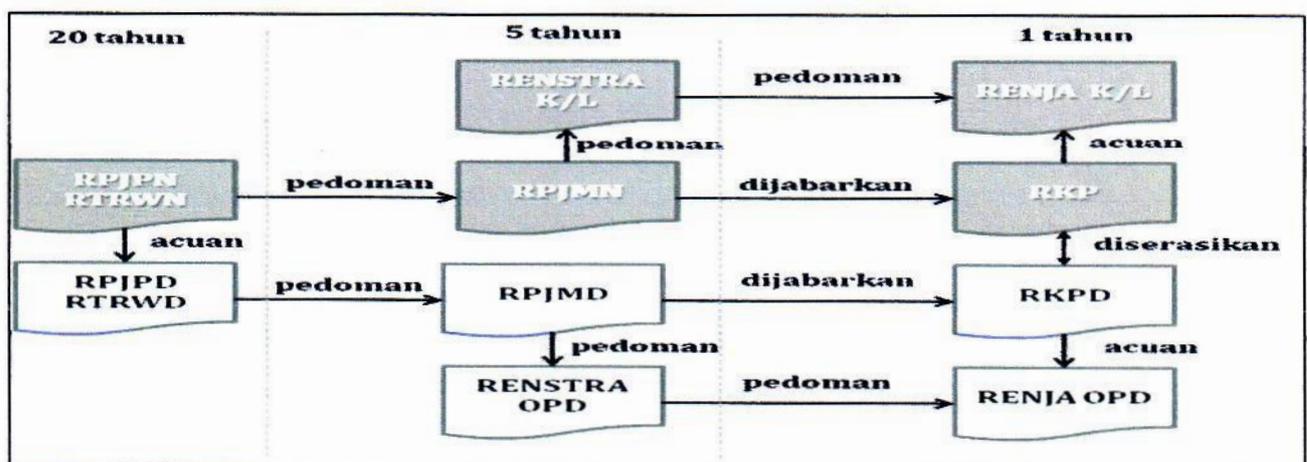
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional, Program Strategis Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dokumen perencanaan provinsi lain, khususnya pembangunan wilayah perbatasan.

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



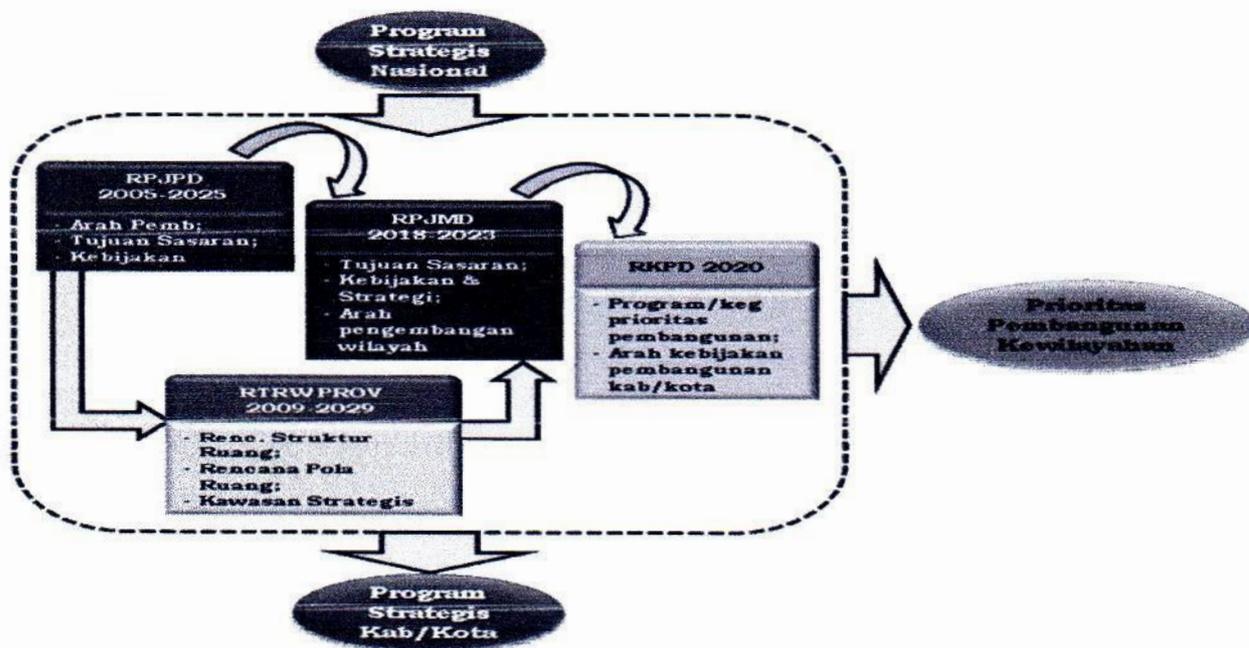
Gambar 1.3.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Handwritten signature or mark.

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.3. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 2) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 3) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 4) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 5) RAD SDGs Tahun 2018-2023; dan 6) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG).

1.3.2. Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, Kabupaten/Kota dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan



Gambar 1.4.

Sinergitas Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lain

Sebagai rencana pembangunan jangka panjang, RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Tahun 2009-2029 dan dipedomani dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada RKPD.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah dan memberikan arah program strategis Jawa Tengah di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah.

16

Membangun kesepahaman dari perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan melalui mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor yang merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Jawa Tengah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020.
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
3. Menjadi acuan penyalarsan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2020.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator program prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

BAB II

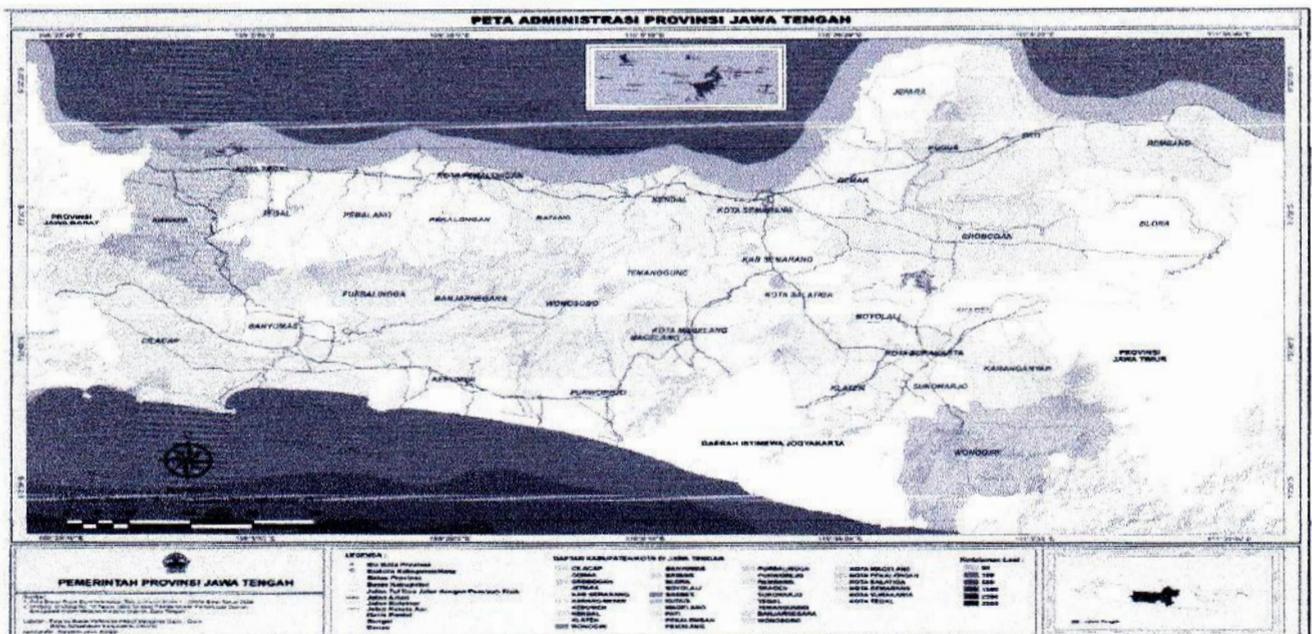
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya), dan pusat pariwisata DIY. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 573 kecamatan, 7.809 desa, dan 769 kelurahan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53% berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang).

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol*, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

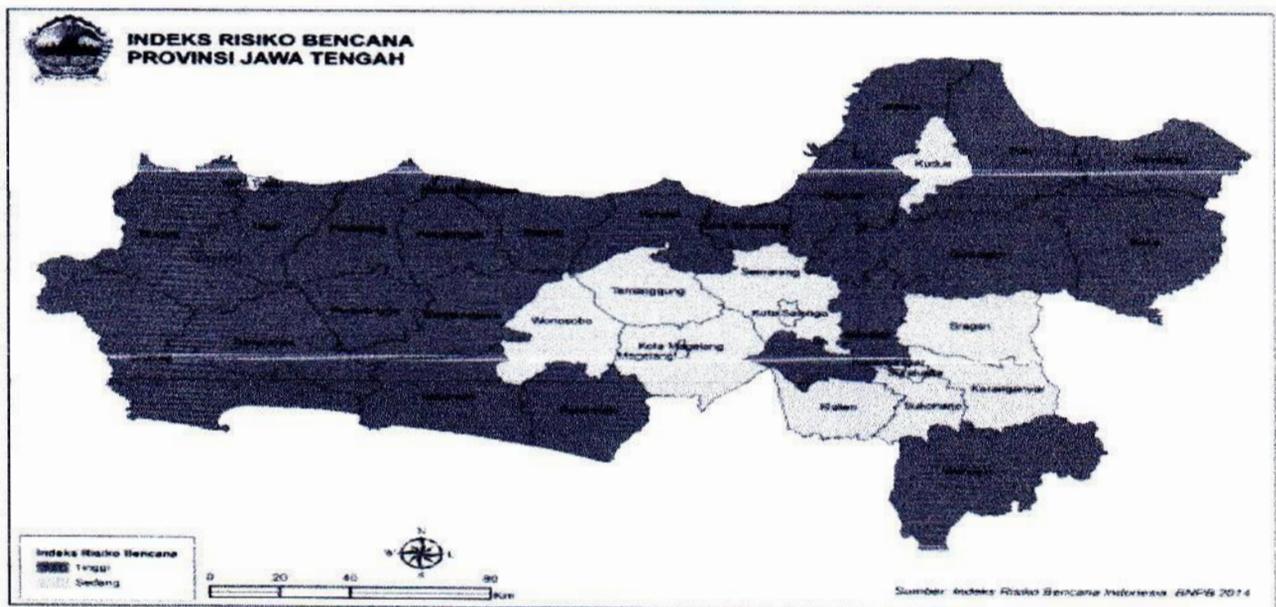
Selanjutnya dari kondisi hidrologi, Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak, dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas. DAS tersebut yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Dari aspek klimatologi, diketahui bahwa suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2017 berkisar 26,8°C sampai dengan 28,9°C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 69,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2017 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 484,0 mm dan curah hujan terendah di bulan Agustus sebesar 15 mm.

Hari hujan terbanyak juga terjadi di bulan Oktober sebanyak 23 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Agustus sebanyak 1 hari hujan.

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan terjadinya perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B).

Dengan berbagai macam kondisi tersebut menggambarkan juga bahwa wilayah Jawa Tengah berpotensi rawan bencana alam. Potensi bencana alam yang masih terus menerus menjadi perhatian antara lain gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dan Purworejo.



Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.2.

Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan perkembangan data kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa intensitas jenis bencana alam yang sering terjadi antara lain angin topan, banjir, gempa bumi, kebakaran, letusan gunung berapi, tanah longsor dan gelombang pasang. Jenis bencana alam yang intensitasnya tinggi sejak beberapa tahun terakhir perlu terus diantisipasi melalui mitigasi dan penanganan pasca bencana dan kesiapan dimasa mendatang untuk antisipasi jika sewaktu waktu kejadian tersebut berulang kembali, sehingga dampak bencana baik korban jiwa maupun materiil dapat diminimalisir.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahap ke-II dalam pentahapan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menjadi tahapan penting dalam pemantapan pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM. Sehingga semua sektor dan prioritas pembangunan diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKPD 2020 mensinergiskan seluruh pelaku pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

Prioritas pembangunan tahun 2020 mengikuti prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diharapkan mampu dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Dokumen RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pembangunan Tahun 2020.

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatn langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 memerlukan komitmen pemerintah dan dukungan sikap mental, tekad, semangat, pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk mencapai cita-cita mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

DATA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

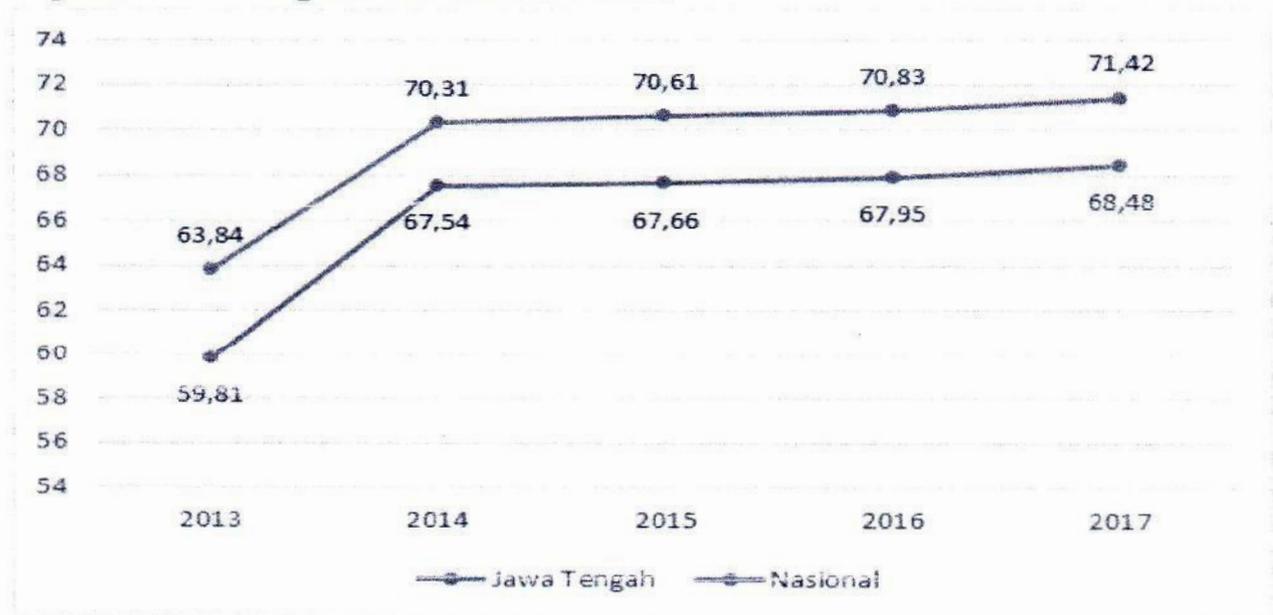
A. UrusanWajibPelayananDasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

a. AngkaPartisipasiSekolah (APS)

Capaian APS pendidikan menengah di Jawa Tengah cenderung meningkat, namun demikian kondisi tersebut masih di bawah capaian Nasional.Hal ini disebabkan antara lain belummemadainyajumlah SMA/SMK/MA di beberapa wilayah kecamatan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja). Capaian APS sebagaimana Gambar A.1.1.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar A.1.1
Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

Pada tahun 2017, APS SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-4, naik dibandingkan tahun 2014 di urutan ke-6 (terakhir) Provinsi se-Jawa sebagaimana dapat dilihat pada Tabel A.1.1.

Tabel A.1.1
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA (16-18 th)
Menurut Nasional dan Provinsi se-Jawa Tahun 2014-2018

No	Provinsi/Nasional	2014	2015	2016	2017	2018
1.	D.I. Yogyakarta	86,44	86,78	87,20	87,61	NA
2.	Jawa Timur	70,25	70,44	70,54	71,51	NA
3.	DKI Jakarta	70,23	70,73	70,83	71,50	NA
4.	Jawa Tengah	67,54	67,66	67,95	68,48	NA
5.	Banten	66,25	66,73	67,00	67,77	NA
6.	Jawa Barat	65,48	65,72	65,82	66,62	NA
	Nasional	70,31	70,61	70,83	71,42	NA

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2019

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APK Jawa Tengah pada semua jenjang pendidikan tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Capaian APK pada jenjang pendidikan SD/MI pada Tahun 2017 sebesar 109,47 mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 109,46, sedangkan APK SMP/MTs pada Tahun 2017 sebesar 100,73 meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebesar 89,96 dan APK SMA/SMK/MA Tahun 2017 sebesar meningkat dari 70,00 menjadi 78,01. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel A.1.2.

Tabel A.1.2
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	SD / MI		SMP / MTs		SMA/SMK/MA	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2014	109,10	110,68	100,54	96,91	73,05	74,63
2	2015	109,31	109,05	100,69	100,51	74,01	75,53
3	2016	109,46	108,00	100,72	100,72	76,43	76,45
4	2017	109,47	106,44	100,73	101,05	78,01	81,95
5	2018	109,40	105,09	99,80	102,10	83	86,90

Sumber :Kemdikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2018 terlihat capaian tertinggi adalah Kabupaten Batang (114,10), dan terendah Kabupaten Demak (98,30). Sedangkan APK SMP/MTs, capaian tertinggi Kota Pekalongan (104,20) dan terendah Kabupaten Banjarnegara (95,40), sedangkan APK SMA/SMK/MA capaian tertinggi adalah Kota Surakarta (100,40), dan terendah Kabupaten Brebes (58,60) Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel A.1.3.

Tabel A.1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016– 2018

No.	Kabupaten/ Kota	2016			2017			2018		
		SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
1	Cilacap	112,42	99,43	78,22	111,28	104,54	95,99	102,00	97,30	82,80
2	Banyumas	108,20	104,79	87,46	106,96	100,34	79,49	106,40	102,20	92,40
3	Purbalingga	109,75	97,27	65,68	107,45	101,54	71,61	106,20	98,50	75,60
4	Banjarnegara	103,83	100,71	67,57	107,73	98,08	66,95	105,10	95,40	86,70
5	Kebumen	106,88	102,20	84,40	107,30	99,45	90,07	100,00	98,10	88,60
6	Purworejo	107,36	101,49	56,56	109,20	100,24	88,87	100,30	102,30	89,50
7	Wonosobo	105,89	99,18	51,45	109,69	98,76	62,05	104,30	101,40	81,20
8	Magelang	102,14	96,36	49,48	105,88	88,39	60,35	99,70	95,80	65,70
9	Boyolali	105,38	101,25	88,09	106,54	95,27	78,66	104,90	99,80	99,80
10	Klaten	108,95	103,24	75,81	106,73	97,93	60,45	111,00	97,90	93,20
11	Sukoharjo	111,81	102,79	89,04	113,79	105,07	87,75	99,00	102,90	85,40
12	Wonogiri	113,08	97,56	80,91	110,38	103,34	93,04	98,40	98,50	92,80
13	Karanganyar	107,74	100,33	61,58	107,30	104,41	62,32	101,30	103,90	83,40
14	Sragen	111,47	99,83	86,22	108,21	107,85	73,41	108,50	102,90	92,70
15	Grobogan	103,16	96,31	76,59	107,03	97,50	64,18	99,60	97,70	91,40
16	Blora	100,37	98,36	83,36	107,13	102,88	72,08	111,50	102,60	95,90
17	Rembang	108,82	96,23	77,09	108,81	101,58	60,61	98,60	99,90	89,90
18	Pati	110,97	106,72	60,22	107,77	101,55	61,19	103,20	99,30	88,70
19	Kudus	111,46	99,23	96,08	107,57	103,91	90,04	107,00	102,90	99,80
20	Jepara	111,46	99,87	75,58	107,34	101,52	61,00	102,60	100,70	82,30
21	Demak	110,99	99,08	64,37	107,71	99,69	92,34	98,30	97,00	80,30
22	Semarang	111,30	97,61	60,31	107,06	97,46	71,75	106,40	102,30	78,70
23	Temanggung	109,34	98,18	65,18	111,29	96,89	63,96	110,10	103,40	79,70
24	Kendal	120,79	98,24	88,41	108,04	99,22	90,38	105,80	101,00	92,90
25	Batang	111,39	98,69	62,36	108,15	88,20	60,77	114,10	102,20	63,70
26	Pekalongan	111,38	98,41	72,50	107,52	90,75	64,31	102,90	100,90	71,70
27	Pemalang	109,64	107,11	77,17	107,72	96,15	66,61	106,80	100,10	70,00
28	Tegal	104,44	97,25	61,13	106,90	101,71	60,93	105,10	102,30	74,30
29	Brebes	101,33	97,22	79,12	107,36	99,11	61,66	106,60	98,50	58,60
30	Kota Magelang	188,49	133,83	263,94	136,01	134,39	173,22	104,20	100,20	90,10
31	Kota Surakarta	127,41	122,94	135,05	125,03	126,85	178,49	106,90	100,10	100,40
32	Kota Salatiga	145,06	120,40	92,30	131,40	126,54	166,89	108,00	101,80	87,40
33	Kota Semarang	110,23	100,77	99,47	123,31	107,53	116,99	106,20	95,90	87,30
34	Kota Pekalongan	144,94	108,58	85,21	139,34	106,77	96,62	110,60	104,20	91,70
35	Kota Tegal	137,42	101,02	89,12	133,10	122,52	129,72	107,20	101,60	96,20
	Jawa Tengah	109,46	100,72	76,43	109,47	100,73	78,01	104,40	99,80	83,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM Jawa Tengah pada seluruh jenjang pendidikan masih di bawah 100%, namun berada di atas angka nasional. Secara rinci perkembangan APM di Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Tabel A.1.4.

Tabel A.1.4
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	SD / MI		SMP / MTs		SMA/SMK/MA	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2014	98,32	93,30	77,83	76,55	59,20	55,88
2	2015	98,43	93,53	79,51	80,76	60,18	57,15
3	2016	98,95	93,38	80,09	81,01	62,21	59,10
4	2017	98,97	93,73	80,11	76,29	64,02	61,20
5	2018	91,70	93,00	75,50	77,00	61,80	63,70

Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2018, terlihat capaian tertinggi Kabupaten Klaten (99,10), dan terendah Kabupaten Demak (85,50). Sedangkan APM SMP/MTs capaian tertinggi Kabupaten Karanganyar (82,00) dan terendah Kabupaten Cilacap dan Grobogan (72,00). Dan APM SMA/SMK/MA capaian tertinggi Kabupaten Boyolali (86,20) dan terendah Kabupaten Brebes (42,80).

Tabel A.1.5

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2018

No.	Kabupaten/ Kota	2016			2017			2018		
		SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
1	Cilacap	99,04	81,05	63,38	98,46	81,80	76,00	88,80	72,00	60,90
2	Banyumas	100,21	88,87	59,12	97,54	75,89	63,20	93,30	77,30	69,50
3	Purbalingga	99,40	80,67	60,68	96,87	76,08	55,91	91,30	74,20	56,00
4	Banjarnegara	98,96	76,71	59,84	96,06	75,02	55,79	92,50	73,00	63,80
5	Kebumen	99,09	76,12	61,48	96,20	75,36	70,28	88,60	74,90	68,10
6	Purworejo	100,50	77,83	73,09	97,46	77,77	66,59	88,80	77,40	67,50
7	Wonosobo	97,05	78,82	43,92	97,28	78,52	54,63	92,90	76,10	60,80
8	Magelang	93,93	73,87	48,61	96,96	84,24	53,12	87,20	72,40	49,90
9	Boyolali	100,40	75,71	66,62	97,05	76,22	57,83	93,90	76,50	86,20
10	Klaten	98,80	82,31	52,30	96,18	76,66	55,11	99,10	74,80	68,90
11	Sukoharjo	99,36	84,32	65,74	99,00	76,41	66,69	88,90	80,40	64,50
12	Wonogiri	99,38	77,66	67,44	97,29	77,49	74,23	88,10	76,40	70,60
13	Karanganyar	97,32	80,43	47,30	98,61	85,27	54,63	91,00	82,00	64,40
14	Sragen	98,18	77,00	68,45	96,77	81,52	57,72	97,50	78,30	69,40
15	Grobogan	95,48	79,86	56,61	97,84	75,88	54,56	85,60	72,00	66,50
16	Blora	93,19	79,05	68,21	97,51	75,57	54,44	96,10	76,50	69,20
17	Rembang	95,36	80,09	66,78	96,52	75,79	53,59	86,90	77,70	68,90
18	Pati	99,50	89,49	50,77	96,39	78,73	54,35	90,90	77,60	67,30
19	Kudus	93,28	83,80	76,57	99,25	95,29	71,28	91,20	78,70	73,90
20	Jepara	94,18	83,86	56,71	96,42	76,48	53,69	90,30	77,60	62,00
21	Demak	96,52	79,25	47,60	97,13	75,62	75,03	85,50	75,10	60,60
22	Semarang	97,81	77,52	54,55	96,27	81,76	58,72	93,00	75,00	57,00
23	Temanggung	98,98	79,19	61,54	98,17	83,66	54,76	96,20	77,20	60,70
24	Kendal	99,42	75,15	66,70	97,40	75,01	69,35	90,70	74,10	65,40
25	Batang	99,18	81,94	50,66	97,73	76,61	54,05	98,40	76,10	46,60
26	Pekalongan	98,98	75,31	63,46	97,30	76,11	56,09	90,00	76,00	54,20
27	Pemalang	100,03	90,26	59,50	97,79	75,05	57,50	92,30	73,60	52,40
28	Tegal	100,32	70,33	55,63	98,68	76,63	53,60	92,90	77,10	53,80
29	Brebes	90,73	75,85	68,55	98,33	75,63	55,33	92,20	72,70	42,80
30	Kota Magelang	168,90	93,95	187,00	119,95	102,67	132,25	94,20	78,00	70,40
31	Kota Surakarta	109,33	86,68	115,48	114,97	100,65	135,15	95,60	77,40	75,30
32	Kota Salatiga	130,70	80,86	73,62	125,53	101,41	108,86	95,70	78,20	66,00
33	Kota Semarang	105,83	83,53	82,34	114,63	100,71	106,12	96,00	72,70	64,50
34	Kota Pekalongan	134,83	82,06	66,84	123,20	101,14	62,99	97,20	76,10	66,10
35	Kota Tegal	133,81	75,50	95,84	121,78	104,41	85,14	95,60	75,60	70,70
	Jawa Tengah	98,95	80,09	62,21	98,97	80,11	64,02	91,70	75,50	61,80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah, semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi akan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selama kurun waktu 2014-2017 penduduk Jawa Tengah sebanyak 5.454.643 siswa berpendidikan /lulusan SD. Pada tahun 2014-2017, APT jenjang SD dari 42% menjadi 37,75%, jenjang SMP, cenderung menurun dari 24,88% menjadi 24,34%, jenjang SMA dari 14,74% meningkat menjadi 15,70%, jenjang SMK dari 12,11, meningkat sebesar 14,18, serta universitas

meningkat dari 6,28% menjadi 8,03%. Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SD dan SMP dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan dasar serta meningkatkan motivasi terhadap pendidikan kepada masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel A.1.6.

Tabel A.1.6
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Berumur 15 tahun Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Thn	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										Jumlah
	SD	APT	SMP	APT	SMA	APT	SMK	APT	Universitas	APT	
2014	5.708.588	42,00	3.380.937	24,88	2.002.946	14,74	1.645.994	12,11	853.088	6,28	13.591.553
2015	5.530.439	40,53	3.344.253	24,51	2.086.195	15,29	1.721.808	12,62	962.219	7,05	13.644.914
2016	5.516.851	39,88	3.451.745	24,95	1.916.989	13,86	1.985.136	14,35	961.515	6,95	13.832.236
2017	5.454.643	37,75	3.517.040	24,34	2.268.256	15,70	2.048.305	14,18	1.160.876	8,03	14.449.120
2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

e. Pendidikan Menengah

1) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi fluktuasi dalam kurun waktu 2014-2018, dengan rasio ketersediaan sekolah sampai dengan tahun 2018 sebesar 14,46 per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi ini disebabkan antara lain sekolah, terutama sekolah swasta yang tutup karena kekurangan siswa atau belum memiliki ijin operasional.

Tabel A.1.7
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah SMA/SMK/MA	2.881	2.388	2.361	3.000	3.215
Jumlah penduduk usia 16-18 th	1.556.312	1.553.498	1.519.321	1.587.478	1.696.000
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16 - 18 tahun	18,51	15,37	15,54	18,90	14,46

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

2) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio jumlah guru SMA/SMK/MA di Jawa Tengah dibandingkan murid di tahun 2014-2018 fluktuatif, cenderung mendekati ideal khususnya di 2015-2016 namun di 2018 rasio dibawah angka ideal yang ditetapkan yaitu 15-20 murid per gurusebagaimana Tabel A.1.8.

Tabel A.1.8
Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014- 2017

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah guru	105.874	59.908	60.507	97.100	96.561
Jumlahmurid	1.151.909	1.149.668	1.161.164	1.238.330	1.270.167
Rasio	1:919	1:521	1:521	1:784	1.765

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

Handwritten mark

3) Serapan Tamatan SMK

Serapan tamatan SMK di Jawa Tengah yang bekerja pada tahun 2018 cenderung meningkat dibanding tahun 2017. Lulusan SMK yang belum bekerja antara lain disebabkan karena belum mengikuti uji kompetensi (bersertifikat), belum berpengalaman kerja, usia lulusan SMK yang belum cukup memenuhi persyaratan usia kerja, serta ada juga lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Tabel A.1.9
Serapan Tamatan SMK
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014- 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlahsiswa kelas III/IV	160.988	169.842	188.970	195.354	164.231
Jumlah lulusan	159.652	169.095	188.308	194.768	164.231
- Bekerja	120.314	117.961	99.558	100.500	111.096
- Wirausaha	1.373	1.623	1.393	1.266	13.159
- Melanjutkan	28.865	37.793	49.412	55.762	22.568
- Belum bekerja	9.100	11.178	37.944	37.240	17.048

Sumber :DinasPendidikan dan KebudayaanProvinsiJawa Tengah, 2019

f. Fasilitas Pendidikan

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan adalah penyediaan sekolah atau ruang kelas yang baik dan sesuai standar nasional pendidikan. Sampai dengan tahun 2018, sekolah SD/MI dalam kondisi baik sebesar 70,76 persen, SMP/MTs sebesar 80,99 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 90,02 persen. yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan sekolah dan ruang kelas sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel A.1.10
KondisiBangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik
Tahun 2014 – 2018 (%)

No	Jenjang	Tahun				
		2014 ^{a)}	2015 ^{a)}	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	95,02	67,97	68,53	70,15	70,76
2	SMP/MTs/SMPLB	98,82	79,36	80,42	80,50	80,99
3	SMA/SMK/MA	82,00	84,33	86,32	88,01	90,02

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Ket: ^{a)}tidak termasuk mebelair

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Jawa Tengah rata-rata menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir di semua jenjang pendidikan. Angka putus sekolah di Jawa Tengah di tahun 2018 tertinggi ada pada jenjang SMP/MTs, yaitu sebesar 0,10, meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun 2014 (0,30). Sementara angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,050 dan SMA/SMK/MA di tahun 2018 sebesar 0,050.

Tabel A.1.11
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014– 2018

No	Jenjang	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	0,09	0,077	0,062	0,060	0,050
2	SMP/MTs/SMPLB	0,30	0,232	0,190	0,170	0,10
3	SMA/SMK/MA	0,06	0,059	0,060	0,059	0,050

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat kelulusan siswa SD/MI mengalami kenaikan dari 99,95 menjadi 99,99, demikian pula SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan dari 99,98 menjadi 99,81 dan SMA/SMK/MA/SMALB mengalami peningkatan dari 99,94 menjadi 100,00. Data selengkapnya pada sebagaimana Tabel A.1.12.

Tabel A.1.12
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014– 2018

No	Jenjang	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	99,95	99,99	99,99	99,99	99,99
2	SMP/MTs/SMPLB	99,98	99,81	99,99	99,97	99,81
3	SMA/SMK/MA	99,94	99,97	99,98	99,99	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Kondisi pada tahun 2014-2018, capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan, yaitu untuk jenjang PAUD dari 31,10 menjadi 49,85; kemudian SD/MI/SDLB dari 53,61 menjadi 86,44; SMP/MTS dari 86,41 menjadi 95,72; dan SMA/SMK/MA dari 93,50 menjadi 98,86. Namun, apabila dilihat perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018), mengalami peningkatan untuk pendidik PAUD, SD/MI/SDLB, SMA/SMK/MA.

Perkembangan capaian pada tahun 2014-2018, sebagaimana tertuang dalam Tabel A.1.13.

Tabel A.1.13
Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah 2014– 2018

No	Jenjang	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	31,10	46,66	47,27	48,69	48,43
2	Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	53,61	77,90	78,80	84,10	81,10
3	Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	86,41	91,45	92,55	94,10	94,88
4	Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	93,50	96,89	96,95	97,69	95,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

R

j. Hasil Evaluasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2018

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 46 target indikator kinerja.

Tabel A.1.14
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2013-2018	Target Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	Status Capaian Target Akhir RPJMD	SKPD
				Tahun 2017	Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pendidikan Menengah							Disdik bud
1	Angka Putus Sekolah	0,05	0,05	0,059	0,05	0,05	●	
2	% Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	90	90,00	88.,1	90,02	90,02	●	
3	% SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar	95	95,00	94,04	95,04	95,04	●	
4	% SMA/MA/SMK yang emiliki sanitasi layak	36,49	36,49	34,06	36,62	36,62	●	
5	% ketersediaan lulusan SMK pada DUDI dan kewirausahaan	73	73,00	72,51	75,66	75,66	●	
6	Jumlah Siswa Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penerima Bantuan Siswa Miskin	69.418	10.230	10.000	7.479	65.482	▼	
II	Program Pendidikan Khusus							Disdik bud
7	APK Pendidikan Khusus	62	62	63,53	65,39	65,39	●	
8	Angka Lulus Pendidikan Khusus	100	100	100,00	100,00	100,00	●	
9	Presentase Ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai Standar Nasional Indonesia	80	80	79,43	80,02	80,02	●	
III	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							Disdik bud
10	Presentase Pendidik PAUD berkualitas S1/D4	48,43	48,43	48,69	49.85	49.85	●	
11	Presentase Pendidik SD/SDLB/MTS terkuafifikasi S1/D4	81,1	81,10	84,10	86.44	86.44	●	
12	Presentase Pendidik SMP/SMPLB/MTS terkuafifikasi S1/D4	94,88	94,88	94,10	95.72	95.72	●	
13	Presentase pendidik PAUD tersertifikat pendidik	19	19,00	29,33	31.07	31.07	●	

R

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2013-2018	Target Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	Status Capaian Target Akhir RPJMD	SKPD
				Tahun 2017	Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Presentase pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	50	50,00	55,34	55.55	55.55	●	
15	Presentase pendidik SMP/SMPLB/MTS bersertifikat pendidik	65	65,00	66,23	67.25	67.25	●	
16	Presentase pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK bersertifikat pendidik	70	70,00	68,50	70.04	70.04	●	
IV	Program manajemen Pelayanan pendidikan							
17	% SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100	100	100	100	100	●	
18	% SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	100	●	
19	% SD/MI melaksanakan MBS dengan Baik	50	50,00	47,20	50,04	50,04	●	
20	% SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik	75	75,00	70,71	75,02	75,02	●	
21	% SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan baik	100	100	100	100	100	●	
V	Program Pendidikan Berkelanjutan							Disdik bud
22	APK PAUD/TK (3-6 th)	80	80,00	79,04	80,04	80,04	●	
23	% lembaga PAUD yang terakreditasi	62	62,00	59,18	62,14	62,14	●	
24	APK SD/SDLB/MI/ Paket A	109,39	109,39	109,47	109,49	109,49	●	
25	APM SD/SDLB/MI/ Paket A	98,62	98,62	98,97	99,03	99,03	●	
26	APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	100,74	100,74	100,73	100,75	100,75	●	
27	APM SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	80	80,00	80,11	80,15	80,15	●	
28	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,05	0,05	0,060	0,060	0,050	●	
29	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	●	
30	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	●	
31	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs	99,81	99,81	99,99	99,81	99,81	●	
32	% Ruang Kelas SD/MI sesuai Standar nasional Indonesia	70,50	70,50	70,15	70,76	70,76	●	
33	% Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs sesuai Standar nasional Indonesia	80,75	80,75	80,50	80,99	80,99	●	
34	% SD/MI yang memiliki	48,50	48,50	82,12	82,27	82,27	●	

R

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2013-2018	Target Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	Status Capaian Target Akhir RPJMD	SKPD
				Tahun 2017	Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perpustakaan sesuai standar							
35	% SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar	84	84,00	82,02	82,04	82,04	●	
36	% SD/MI yang memiliki sanitasi layak	73,50	73,50	72,53	73,59	73,59	●	
37	% SMP/Mts yang memiliki sanitasi layak	80	80,00	76,16	80,02	80,02	●	
38	Angka Lulus kesetaraan paket A	96	96,00	96,16	97,72	97,72	●	
39	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	96,50	96,50	96,39	96,54	96,54	●	
40	Angka lulus kesetaraan paket C	98,50	98,50	98,41	98,54	98,54	●	
41	Presentase lembaga kursus dan pelatihan (LPK) berkinerja A dan B	5	5,00	5,46	12,15	12,15	●	
42	Presentase buta aksara >15 tahun	1,50	1,50	1,98	1,50	1,50	●	
43	Persentase kecamatan memiliki PKBM dan TBM	17,50	17,50	51,32	57,50	57,50	●	
44	% perguruan tinggi yang terfasilitasi	50	50,00	56,08	55,80	55,80	●	
45	% sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan	50	50,00	83,15	83,25	83,25	●	
46	% sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka	100	100	100	100	100	●	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▼ : Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2013-2018, dari sebanyak 46 indikator diketahui bahwa 45 target indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Siswa Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penerima Bantuan Siswa, disebabkan siswa penerima BSM sudah mendapatkan bantuan KIP dari Pusat.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prekaraan Meju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	NON URUSAN									
0	NON URUSAN									
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kependidikan dan Keuangan Perangkat Daerah				66.629.864.000		76.831.950		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis)	4 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	5.500.000.000	4 Dokumen	6.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT
		Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis)	4 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	5.500.000.000	4 Dokumen	6.500.000		
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	7.935	OPD Provinsi; BATANG; KENDAL; KOTA PEKALONGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	75.000.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	75.000.000	12 Bulan	150.000		
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	9.162	OPD Provinsi; PEKALONGAN; TEGAL; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	19.683	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG; SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	43.500	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	7.260	OPD Provinsi; KOTA TEGAL; BREBES	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	10.000.000	12 Bulan	30.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	6.600	OPD Provinsi; JEPARA; DEMAK	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	6.000.000	12 Bulan	7.260	OPD Provinsi; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	12 Bulan	10.000	OPD Provinsi; MAGELANG; KOTA MAGELANG; TEMANGGUNG; PURWOREJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi; KOTA SALATIGA; KLATEN; BOYOLALI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	34.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	12.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; SRAGEN; WONOGIRI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	8.640	OPD Provinsi; KUDUS; PATI; REMBANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	8.000	OPD Provinsi; WONOSOBO; PURBALINGGA; KEBUMEN; BANJARNEGARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	200.000.000	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; BLORA; GROBOGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	220.000.000	12 Bulan	220.000	OPD Provinsi; BANYUMAS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	220.000.000	12 Bulan	242.000	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	300.000.000	12 Bulan	300.000	OPD Provinsi; BANJARNEGARA; WONOSOBO; KEBUMEN; PURBALINGGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	200.000.000	12 Bulan	215.000	OPD Provinsi; TEMANGGUNG; PURWOREJO; KOTA MAGELANG; MAGELANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	2.583.000.000	12 Bulan	3.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT	
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	2.583.000.000	12 Bulan	3.000.000			
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	230.000.000	12 Bulan	264.500	OPD Provinsi; KENDAL; KOTA PEKALONGAN; BATANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	245.000.000	12 Bulan	269.500	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	520.000.000	12 Bulan	525.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	1.200.000.000	12 Bulan	1.300.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	200.000.000	12 Bulan	205.000	OPD Provinsi; WONOGIRI; KARANGANYAR; SRAGEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	120.000.000	12 Bulan	126.000	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	220.000.000	12 Bulan	264.000	OPD Provinsi; REMBANG; PATI; KUDUS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp.				
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	168.000.000	12 Bulan	167.000	OPD Provinsi; PEKALONGAN; PEMALANG; TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	220.000.000	12 Bulan	242.000	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan Listrik perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	552.260.000	12 Bulan	604.800	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	220.000.000	12 Bulan	220.000	OPD Provinsi; BOYOLALI; KLATEN; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; SRAGEN; WONOGIRI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	7.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG; SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; CILACAP; BANYUMAS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	35.000.000	12 Bulan	60.500	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	690.000.000	12 Bulan	700.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	690.000.000	12 Bulan	700.000		
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	55.000.000	12 Bulan	60.500	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; PURBALINGGA; WONOSOBO; BANJARNEGARA; KEBUMEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; BOYOLALI; KLATEN; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	37.500.000	12 Bulan	66.125	OPD Provinsi; KOTA PEKALONGAN; KENDAL; BATANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; TEGAL; PEKALONGAN; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.000.000	12 Bulan	55.000	OPD Provinsi; JEPARA; DEMAK	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; PURWOREJO; MAGELANG; KOTA MAGELANG; TEMANGGUNG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	60.000	OPD Provinsi; REMBANG; KUDUS; PATI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	180.000.000	12 Bulan	180.000	OPD Provinsi; BANJARNEGARA; PURBALINGGA; KEBUMEN; WONOSOBO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Ar

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp.			Rp. (000)	
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	125.000.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; PATI; KUDUS; REMBANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	500.000.000	12 Bulan	505.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	200.000.000	12 Bulan	411.518	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	125.000.000	12 Bulan	125.000	OPD Provinsi; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	115.694.000	12 Bulan	121.479	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	125.000.000	12 Bulan	125.000	OPD Provinsi; BANYUMAS; CILACAP	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	110.000.000	12 Bulan	120.000	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; TEMANGGUNG; MAGELANG; PURWOREJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	110.000.000	12 Bulan	121.000	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	143.924.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; TEGAL; PEKALONGAN; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	13.375.000.000	12 Bulan	15.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	13.375.000.000	12 Bulan	15.000.000		
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	709.588.000	12 Bulan	780.500	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Tarian Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	110.000.000	12 Bulan	121.000	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	200.000.000	12 Bulan	500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	115.000.000	12 Bulan	132.250	OPD Provinsi; BATANG; KOTA PEKALONGAN; KENDAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	200.000.000	12 Bulan	210.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; SRAGEN; WONOGIRI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	114.908.000	12 Bulan	130.000	OPD Provinsi; BLORA; GROBOGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	150.000.000	12 Bulan	242.017	OPD Provinsi; KENDAL; BATANG; KOTA PEKALONGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	200.000.000	12 Bulan	250.000	OPD Provinsi; WONOSOBO; BANJARNEGARA; PURBALINGGA; KEBUMEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	150.000.000	12 Bulan	280.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; WONOGIRI; SRAGEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prekirean Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	260.400	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	300.000	OPD Provinsi; KUDUS; REMBANG; PATI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	80.000.000	12 Bulan	85.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	250.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	210.000	OPD Provinsi; TEGAL; PEKALONGAN; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	221.430	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	430.868	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG; SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.200.000.000	12 Bulan	1.600.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.200.000.000	12 Bulan	1.600.000		
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; GILCAP; BANYUMAS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	260.000	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG; MAGELANG; TEMANGGUNG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	210.100	OPD Provinsi; JEPARA; DEMAK	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	221.430	OPD Provinsi; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	63.000.000	12 Bulan	65.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	110.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; SRAGEN; WONOGIRI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	99.187	OPD Provinsi; KOTA PEKALONGAN; BATANG; KENDAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	50.000.000	12 Bulan	78.600	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	12 Bulan	65.000	OPD Provinsi; PEMALANG; TEGAL; PEKALONGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	30.000	OPD Provinsi; PURWOREJO; TEMANGGUNG; KOTA MAGELANG; MAGELANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	120.450	OPD Provinsi; JEPARA; DEMAK	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	90.750	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	130.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	780.000.000	12 Bulan	870.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	780.000.000	12 Bulan	870.000			
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	125.000	OPD Provinsi; PURBALINGGA; WONOSOBO; KEBUMEN; BANJARNEGARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	80.000	OPD Provinsi; BANYUMAS; CILACAP	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	90.750	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	108.000	OPD Provinsi; REMBANG; PATI; KUDUS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	46.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	161.427	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	50.000.000	12 Bulan	80.000	OPD Provinsi; BOYOLALI; KOTA SALATIGA; KLATEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	15.000.000	12 Bulan	37.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	9.000	OPD Provinsi; KEBUMEN; WONOSOBO; BANJARNEGARA; PURBALINGGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	6.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	15.000.000	12 Bulan	55.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	7.935	OPD Provinsi; BATANG; KOTA PEKALONGAN; KENDAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	6.000.000	12 Bulan	7.260	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	38.200	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	6.000	OPD Provinsi; PEMALANG; TEGAL; PEKALONGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	7.260	OPD Provinsi; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	12.096	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	20.000.000	12 Bulan	42.500	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	20.000.000	12 Bulan	42.500		
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	7.000	OPD Provinsi; BANYUMAS; CILACAP	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	6.600	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	8.640	OPD Provinsi; PATI; KUDUS; REMBANG	-
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	7.500	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	6.000.000	12 Bulan	12.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; WONOGIRI; SRAGEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.900.000.000	12 Bulan	1.950.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.500.000.000	12 Bulan	1.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.500.000.000	12 Bulan	1.500.000		
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	1.612.485.000	12 Bulan	2.050.000	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	250.000	OPD Provinsi; BANYUMAS; CILACAP	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	250.000	OPD Provinsi; BOYOLALI; KLATEN; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; KENDAL; BATANG; KOTA PEKALONGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; PEKALONGAN; TEGAL; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	165.000.000	12 Bulan	181.500	OPD Provinsi; KOTA TEGAL; BREBES	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	850.000.000	12 Bulan	900.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	270.000	OPD Provinsi; KEBUMEN; PURBALINGGA; BANJARNEGARA; WONOSOBO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	200.000.000	12 Bulan	120.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; B.LORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	280.000.000	12 Bulan	290.000	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	300.000	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	20.086.000	12 Bulan	21.090	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	165.000.000	12 Bulan	181.500	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	250.000.000	12 Bulan	300.000	OPD Provinsi; SRAGEN; WONOGIRI; KARANGANYAR	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	204.500.000	12 Bulan	245.400	OPD Provinsi; PATI; KUDUS; REMBANG	-
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	29.702.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; BLORA; GROBOGAN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	900.000.000	12 Bulan	925.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	900.000.000	12 Bulan	925.000		
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	485.700.000	12 Bulan	534.200	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	30.309.000	12 Bulan	33.339	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	260.000.000	12 Bulan	270.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	75.000.000	12 Bulan	85.000	OPD Provinsi; KEBUMEN; BANJARNEGARA; PURBALINGGA; WONOSOBO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	100.000.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	90.000.000	12 Bulan	108.000	OPD Provinsi; KUDUS; PATI; REMBANG	-
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	28.436.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; MAGELANG; TEMANGGUNG; PURWOREJO; KOTA MAGELANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	136.490.000	12 Bulan	143.315	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	82.500.000	12 Bulan	90.750	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	27.500.000	12 Bulan	30.250	OPD Provinsi; BREBES; KOTA TEGAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	48.000.000	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi; TEGAL; PEKALONGAN; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	100.000.000	12 Bulan	100.000	OPD Provinsi; CILACAP; BANYUMAS	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	150.000.000	12 Bulan	170.000	OPD Provinsi; SRAGEN; WONOGIRI; KARANGANYAR	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	86.250.000	12 Bulan	99.187	OPD Provinsi; KOTA PEKALONGAN; BATANG; KENDAL	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	100.000.000	12 Bulan	100.000	OPD Provinsi; KLATEN; KOTA SALATIGA; BOYOLALI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	300.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; BANYUMAS; CILACAP	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	290.000.000	12 Bulan	400.000	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	300.000.000	12 Bulan	400.000	OPD Provinsi; WONOSOBO; BANJARNEGARA; KEBUMEN; PURBALINGGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	300.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; KENDAL; KOTA PEKALONGAN; BATANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	100.000.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100.00.00%	300.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; TEGAL; PEKALONGAN; PEMALANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	100.000.000	12 Bulan	46.200	OPD Provinsi; SEMARANG; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	300.000.000	12 Bulan	400.000	OPD Provinsi; DEMAK; JEPARA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	600.000.000	3 Paket	750.000	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	SUB BAGIAN TATA USAHA - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	100.000.000	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; KOTA TEGAL; BREBES	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	350.000.000	12 Bulan	350.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	136.000.000	12 Bulan	140.000	OPD Provinsi; TEMANGGUNG; KOTA MAGELANG; PURWOREJO; MAGELANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	227.279.000	12 Bulan	272.734	OPD Provinsi; KUDUS; REMBANG; PATI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	2.300.000.000	12 Bulan	1.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	2.300.000.000	12 Bulan	1.500.000		
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	1.000.000.000	12 Bulan	1.200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	300.000.000	12 Bulan	400.000	OPD Provinsi; WONOGIRI; KARANGANYAR; SRAGEN	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	100.000.000	12 Bulan	100.000	OPD Provinsi; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SALATIGA	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	300 Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	550.000.000	400 Kegiatan	750.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG-->SEMARANG BARAT-->KELURAHAN GISIKDRONO	SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	12 Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	4.741.800.000	12 Kegiatan	5.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	12 Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	4.741.800.000	12 Kegiatan	5.000.000		
0.00.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	5 Jenis	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	1.458.200.000	5 Jenis	1.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
		Jumlah Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	5 Jenis	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	1.458.200.000	5 Jenis	1.500.000		
0.00.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	7.000.000	12 Bulan	10.000	OPD Provinsi; KARANGANYAR; SRAGEN; WONOGIRI	SUB BAGIAN TATA USAHA - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
0.00.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	290.000.000	12 Bulan	300.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

A

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rp.	Prekirean Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
		Keluaran		Hasil			Target	Rp. (000)		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2.16.15.004	Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT	Jumlah seni budaya yang dipentaskan	98 Kegiatan	Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	71.42%	1.000.000.000	98 Kegiatan	1.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A; KOTA SURAKARTA	SEKSI PERTUNJUKAN DAN PAMERAN SENI - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
2.16.15.005	Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT	Jumlah pelaku seni yang terlayani	900 Orang	Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	71.42%	600.000.000	975 Orang	620.825	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A; KOTA SURAKARTA	SEKSI PELESTARIAN SENI - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
2.16.15.006	Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita	Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita	1 Kegiatan	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	88.20%	3.500.000.000	1 Kegiatan	3.500.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A; KOTA SEMARANG	SEKSI PELAYANAN PERMUSEUMAN - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
2.16.15.007	Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita	Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno	1 Kegiatan	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	88.20%	646.175.000	1 Kegiatan	661.175	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A; KOTA SEMARANG	SEKSI PELESTARIAN - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
2.16.15.008	Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah	Jumlah event kesenian yang diselenggarakan	40 Kali	Persentase jenis budaya yang terlayani	4.70%	8.845.075.000	40 Kali	9.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan; KOTA SEMARANG	SEKSI KESENIAN - Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Jumlah kajian bahasa daerah (dialek)	1 Jenis			600.000.000	1 Jenis	600.000		
2.16.15.009	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan	12 Kegiatan			1.890.000.000	10 Kegiatan	1.890.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan; KOTA SEMARANG	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN - Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Jumlah museum yang terfasilitasi	63 Unit			35.000.000	63 Unit	35.000		
2.16.15.010	Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi	Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan	16 Kegiatan	Persentase sumber belajar berbasis budaya	0.32%	950.000.000	17 Kegiatan	950.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan; KOTA SEMARANG	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI - Bidang Pembinaan Kebudayaan
Total						2.199.371.212.000		2.195.406.867		

CUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO